

ABSTRAK

Ayu Indri Astining Tyas (NIM. 212254). Analisis Kesesuaian Upah Minimum yang Ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Upah yang Diterima oleh Para Pekerja (Studi Kasus SPBU di Kabupaten Kudus). Skripsi, Kudus: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2016.

Tujuan penelitian ini adalah 1) dapat mengetahui proses penetapan Upah Minimum di Kabupaten Kudus. 2) dapat mengetahui kesesuaian antara upah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dengan Upah yang diterima para pekerja/karyawan SPBU.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan studi kasus pada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kudus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) kepada Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kudus selaku petugas penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), para pekerja SPBU selaku penerima upah, dan pihak perusahaan SPBU untuk mensinkronkan data dari pekerjanya. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berperan penting dalam memecahkan masalah penelitian.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan besarnya nilai UMK yang mencapai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Pencapaian nilai KHL ini diharapkan agar UMK dapat berperan sebagai jaring pengaman bagi para pekerja/buruh. Namun dalam praktik penerimaan upah, terdapat beberapa pekerja yang mengaku bahwa mereka pernah atau masih menerima gaji di bawah UMK Kudus. Hanya sebagian saja perusahaan SPBU di Kabupaten Kudus yang telah membayarkan gaji kepada para pekerja dengan sesuai UMK. Hal ini bisa saja dikarenakan perusahaan juga harus mempertimbangkan besarnya nilai upah sebagai biaya pengeluaran perusahaan agar keberlangsungan usaha tetap berjalan. Meski demikian, antara perusahaan dan pekerja harus menyepakati besar kecilnya pengupahan tersebut secara bipartit. Sehingga, para pekerja tidak mengalami permasalahan dalam memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kata Kunci: Upah Minimum Kabupaten (UMK), Penerimaan Upah.